



KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

accountability
& transparency

LAPORAN TAHUNAN
2013

SAMBUTAN

Ketua Komite Konsultatif Komite Standar Akuntansi Pemerintahan



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengemban tugas yang berat dalam menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harus diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut disusun dengan memperhatikan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang baik, serta mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Tahun 2013 ini merupakan tahun keempat berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 diatur mengenai SAP Berbasis Akrual (Lampiran I) maupun SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (Lampiran II), hal ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk persiapan secara bertahap penerapan SAP Berbasis Akrual yang paling lambat diterapkan untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.

Pada tahun ini, KSAP juga melaksanakan tugas-tugas terkait dengan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (*cash towards accrual*) yang masih diberlakukan sampai dengan tahun 2014, seperti penyusunan beberapa Buletin Teknis beserta sosialisasinya kepada unit-unit instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KSAP selama tahun 2013 tersebut telah disusun dengan lengkap dan sistematis dalam Laporan Tahunan KSAP 2013 ini, agar dapat menjadi media akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku

kepentingan (*stakeholders*), khususnya Presiden RI melalui Menteri Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja KSAP yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun, mengembangkan, dan membantu implementasi SAP. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2013 ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja KSAP pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2014
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Selaku Ketua Komite Konsultatif
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,



Marwanto Harjowiryo

PENGANTAR

Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Tahunan KSAP Tahun 2013 ini disusun sebagai media transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai KSAP selama tahun 2013.

Disamping menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), KSAP terus berupaya mendukung implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selama tahun 2013, selain menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan beberapa Buletin Teknis, KSAP juga melaksanakan tugas untuk ikut mendorong implementasi SAP dengan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, lokakarya (*workshop*), pelayanan publik, dan *help desk*. Selain itu KSAP juga memberikan konsultasi terhadap pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diterima KSAP terkait permasalahan dalam implementasi SAP baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Tahun 2013 ini, KSAP juga telah mengikuti sejumlah seminar, antara lain Seminar Nasional Akuntansi di Manado.

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, selain melaporkan seluruh kegiatan KSAP sepanjang Tahun 2013, Laporan Tahunan KSAP Tahun 2013 ini juga memuat informasi keuangan KSAP tahun 2013.

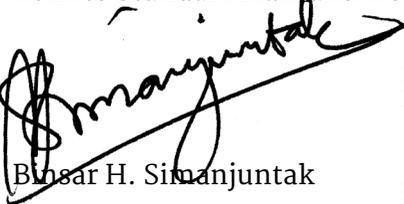


Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan agar dalam pelaksanaan kegiatan KSAP pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, Januari 2014

Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,



Besar H. Simanjuntak

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komite Konsultatif	1
Pengantar Ketua Komite Kerja.....	2
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Bab I Pendahuluan	7
A. Organisasi dan Kedudukan KSAP.....	8
B. Tugas Pokok KSAP.....	9
Bab II Rencana Kerja KSAP Tahun 2013	13
A. Kondisi Umum.....	13
B. Rencana Strategis.....	15
Bab III Kinerja KSAP	23
A. Capaian Kinerja.....	23
B. Pelaksanaan Kegiatan.....	24
C. Aspek Keuangan	29
D. Lain-lain	30
E. Kendala dan Strategi Pemecahannya ...	30
Bab IV Rencana Kerja Tahun 2014	31
Bab V Penutup	35

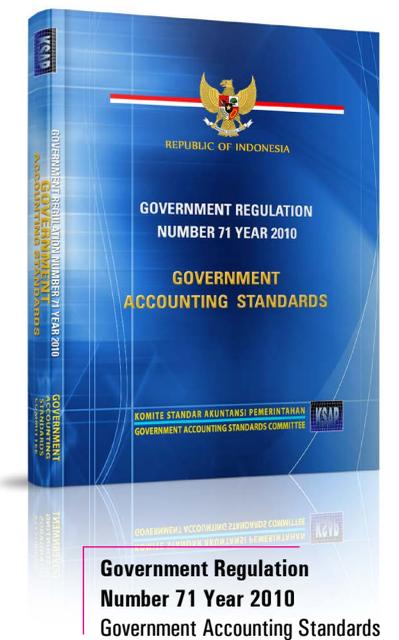
DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rencana Strategis Tahun 2010 s.d. Tahun 2014.....	11
Tabel 2 : Rencana dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2013	23

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan KSAP disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Independen yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres Nomor 21 tahun 2013.



A. Organisasi dan Kedudukan KSAP

KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 21 Tahun 2013 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan, mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan, dan proses penyusunan (*due process*) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi pemerintah, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 21 Tahun 2013 adalah:

Komite Konsultatif:



1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebagai Anggota;
4. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota;
5. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA sebagai Anggota; dan
6. Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa sebagai Anggota.

Komite Kerja:



1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. AB Triharta, Ak., MM sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sonny Loho, Ak., MPM sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., CPA sebagai Anggota;
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM sebagai Anggota;
6. Dr. Dwi Martani, SE, Ak. sebagai Anggota;
7. Sumiyati, Ak., MFM sebagai Anggota;
8. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc. sebagai Anggota;
9. Drs. Hamdani, MM, Msi, Ak., CA sebagai Anggota

B. Tugas Pokok KSAP

Berdasarkan Keppres Nomor 21 Tahun 2013, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Keppres No. 21 Tahun 2013, KSAP terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sebagaimana tercantum dalam Keppres tersebut, dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP untuk perumusan dan pengembangan SAP, Komite Kerja membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja.

Kelompok Kerja periode tahun 2013 terakhir kali dibentuk dan sebagaimana telah diubah pada tanggal 27 Mei 2013 dengan KEP-9/K.1/KSAP/V/2013 beranggotakan 31 orang yang berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. R. Wiwin Istanti, SE., Ak. M. LAWS., Ketua;
2. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Wakil Ketua;
3. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota;
4. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., Anggota;
5. Drs. Hamdani, MM., MSi., Ak., Anggota;
6. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota;
7. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota;
8. Mhd. Syahman Sitompul, SE, Ak., M.Si., Anggota;
9. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota;
10. Chalimah Pujihastuti, SE, Ak., MAFIS.,
11. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, Anggota;
12. Hasanuddin, Ak., M.Ak., Anggota;
13. Syaiful, SE, Ak., MM, Anggota;
14. Hamim Mustofa, Ak., Anggota;
15. Heru Novandi, SE, Ak., Anggota;
16. Muliani Sulya F., SE, Anggota;
17. Zulfikar Aragani, SE., Anggota;
18. Tio Novita Efriani, SE, Ak., MGPP, Anggota;
19. Mugiya Wardhani, SE, Ak., MM, Anggota;
20. Rahmat Mulyono, SE, Ak., M.Acc, Anggota;
21. Hari Sugiyanto, Ak. MSc., Anggota;
22. Lucia Widiharsanti, SE, M.Si., CFE, Anggota;
23. Dr. Mei Ling, SE, Ak., MBA, Anggota;
24. Basuki Rahmat, SE, Anggota;
25. Jamason Sinaga, Ak., SIP., Anggota;

26. Agung Kurniawan Purbohadi, SE., Ak., MM., Anggota;
27. Kadek Imam Eriksiawan M.Sc., Ak., M.Prof. Acc., BAP., Anggota;
28. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof. ACC., Anggota;
29. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., Anggota;
30. Toni Triyulianto, Ak., MPP., Anggota; dan
31. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., Anggota.

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 4/KM.5/2013 tentang Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Hari Sugiyanto, Ak. MSc, Ketua;
2. Masta Boru Manurung, Wakil Ketua;
3. Budiman, Anggota;
4. Zulfikar Aragani, Anggota
5. Siti Syarifah, Anggota;
6. Basuki Rahmat, Anggota;
7. Husni Firmansyah, Anggota;
8. Ahmad Abdul Haq, Anggota;
9. Wachid Ahyani, Anggota; dan
10. Affifah Nurviana, Anggota.

Sekretariat KSAP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bertugas:

1. Memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka penyusunan dan sosialisasi SAP.
2. Mengelola website KSAP.
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

BAB II

RENCANA KERJA KSAP TAHUN 2013

A. *Kondisi Umum*

Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 yang antara lain menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen, Pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan Keputusan Presiden, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP) yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Begitu pula Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008, dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Untuk memenuhi amanat UU tersebut, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. SAP dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, serta basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). SAP dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.

Terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah dan DPR sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat banyak kendala sehingga implementasi akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan sepenuhnya pada tahun 2008. Hal ini mendasari kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara bertahap, terhitung mulai tahun 2009 sesuai dengan kondisi dan kemampuan Indonesia.

Sebagai langkah awal untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual dan telah ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.

Lingkup dari PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sementara SAP berbasis kas menuju akrual terdapat pada Lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual dengan batas waktu masa transisi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Rencana Strategis KSAP tahun 2012 – 2015, disusun sejalan dengan rencana pentahapan implementasi akuntansi berbasis akrual yang dicanangkan oleh Pemerintah. Pada tahun 2012 dan 2013, fokus utama dari KSAP adalah penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) untuk melengkapi PSAP yang telah ada, Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP merupakan penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana tertuang pada PP SAP. Sedangkan Buletin Teknis berisi informasi dan penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi para pengguna.

KSAP pada periode 2013 – 2015 membantu implementasi SAP baik pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. KSAP mendorong Pemerintah agar mempersiapkan implementasi akuntansi akrual dengan baik, sehingga pada tahun 2015 diharapkan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.



High level meeting KSAP.
BPK-Kemenkeu-
Kemendagri

B. Rencana Strategis

Rencana strategis suatu organisasi memuat visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. KSAP telah merumuskan rencana strategis dengan visi, misi dan tujuan berikut ini.

Visi :

”Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas.”

Misi :

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

Tujuan:

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini:

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.

2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Rencana kerja tersebut telah disesuaikan berdasarkan perkembangan yang terjadi selama tahun 2012.

Tabel 1: Rencana Strategis Tahun 2010 s.d. Tahun 2014

Tahun 2010		
1.	Penyusunan SAP Berbasis Akruwal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finalisasi SAP Berbasis Akruwal 2. Pembahasan dengan Sekretariat Negara untuk penerbitan PP SAP 3. Penerbitan PP SAP Berbasis Akruwal
2.	Penyusunan Buletin Teknis SAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Pembahasan buletin teknis SAP CTA <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Aset Tetap • Buletin Teknis Bantuan Sosial • Buletin Teknis Hibah • Buletin Teknis Aset Tak Berwujud • Buletin Teknis Kas • Buletin Teknis Selisih Kurs • Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan 2. Penyusunan dan Pembahasan buletin teknis SAP Akruwal <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan • Buletin Teknis PNBPN 3. Penerbitan buletin teknis SAP CTA <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Aset Tetap

3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akruwal dan Buletin Teknis CTA 2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 3. Pemeliharaan Website KSAP
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyelenggaraan Help Desk 5. Pelayanan Publik
4.	International Events	Pertemuan Governmental Accounting Standards Setters of ASEAN Member Countries

Tahun 2011

1.	Pengembangan SAP Berbasis Akruwal	Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO
2.	Penyusunan Buletin Teknis SAP	Penerbitan buletin teknis SAP CTA <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Bantuan Sosial • Buletin Teknis Hibah • Buletin Teknis Aset Tak Berwujud • Buletin Teknis Kas • Buletin Teknis Selisih Kurs • Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan • Buletin Teknis Pendapatan Negara Bukan Pajak • Buletin Teknis Akuntansi Penerusan Pinjaman
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akruwal dan Buletin Teknis CTA 2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 3. Pemeliharaan Website KSAP 4. Penyelenggaraan Help Desk 5. Pelayanan Publik

Tahun 2012		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akrua	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO • Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Badan Layanan Umum
2.	Penyusunan Interpretasi PSAP	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Interpretasi PSAP tentang tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah • Penyusunan IPSAP tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
3.	Penyusunan Buletin Teknis SAP	Penyusunan buletin teknis SAP <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Hibah • Buletin Teknis Kas • Buletin Teknis Selisih Kurs • Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan • Buletin Teknis Pendapatan Negara Bukan Pajak
4.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA 2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 3. Pemeliharaan Website KSAP 4. Penyelenggaraan Help Desk 5. Pelayanan Publik

Tahun 2013		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akrua	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO • Penyusunan PSAP tentang Akuntansi BLU • Pengembangan SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan
2.	Penyusunan Buletin Teknis SAP	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA 2. Pelaksanaan Training of Trainers 3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 4. Pemeliharaan Website KSAP 5. Penyelenggaraan Help Desk 6. Pelayanan Publik
Tahun 2014		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akrua	Pengembangan SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan
2.	Penyusunan Buletin Teknis SAP	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA 2. Pelaksanaan Training of Trainers 3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 4. Pemeliharaan Website KSAP 5. Penyelenggaraan Help Desk 6. Pelayanan Publik

Berdasarkan rencana kerja jangka menengah, program kerja dan kegiatan KSAP tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual



Limited Hearing PSAP tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan umum

Pada tahun 2013 ini, KSAP merencanakan menyusun beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Akrual (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010). Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. PSAP ini disusun untuk memberikan arahan/pedoman terkait pertanggungjawaban keuangan negara. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya PSAP.

2. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

KSAP di Tahun 2013 ini merencanakan menyusun beberapa buletin teknis dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010). Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan para pemangku kepentingan. Buletin teknis ini disusun untuk memberikan arahan/pedoman teknis penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya Buletin Teknis.

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

a. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

b. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik untuk internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

c. Pemeliharaan Website KSAP

Sejak tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

d. Penyelenggaraan Help Desk

Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkan SAP, KSAP membentuk *helpdesk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya.



Suasana rapat rutin KSAP

BAB III KINERJA KSAP

A. Kinerja

Tahun 2013 merupakan periode untuk mensosialisasikan SAP Berbasis Akruwal melanjutkan sosialisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2011, selain itu tahun 2013 merupakan tahun persiapan Implementasi SAP Akruwal. Dalam rangka Implementasi SAP Akruwal dimaksud KSAP didaulat untuk menyiapkan peraturan di bidang SAP dan turunannya, yaitu interpretasi SAP dan buletin teknis SAP.

Pada Tahun 2013 KSAP menerbitkan Buletin Teknis, menyusun draft SAP, melakukan layanan publik berupa konsultasi permasalahan implementasi SAP dan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta kegiatan lainnya.



**Bunga Rampai
STUDI KASUS**
Akuntansi Pemerintahan
Tahun 2007-2013

Ringkasan kinerja KSAP pada tahun 2013 adalah:

1. Menetapkan 2 (dua) buletin teknis SAP yaitu:
 - a. Buletin Teknis SAP No. 13 tentang Akuntansi Hibah, dan
 - b. Buletin Teknis SAP No. 14 tentang Akuntansi Kas.
2. Menyusun 2 (dua) draf Final Pernyataan Standar yaitu:
 - a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Pendapatan-LO, dan

- b. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi BLU;
3. Menyusun Revisi PSAP Investasi;
4. Menyusun 4 (empat) draf buletin teknis, yaitu:
 - a. Buletin Teknis tentang Akuntansi Piutang- Akrua,
 - b. Buletin Teknis tentang Akuntansi Kerugian Negara,
 - c. Buletin Teknis tentang Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan
 - d. Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Pajak.
5. Mengadakan dengar pendapat terbatas Draft PSAP tentang Akuntansi BLU yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2013 di Jakarta;
6. Mendukung Sosialisasi SAP, sebagai narasumber pada beberapa Kementerian/ Lembaga, Pemda dan Perguruan Tinggi
7. Mengembangkan SDM dengan mengirim SDM KSAP untuk mengikuti berbagai seminar, kongres dan konferensi akuntansi Antara lain APEC *Meeting* dan Simposium Akuntansi Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia; dan
8. Melayani publik menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan akuntansi pemerintahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tahun 2013 tercatat kSAP telah menerima surat konsultasi implementasi SAP sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat dan telah dijawab oleh KSAP di tahun 2013 sebanyak 19 (sembilan belas) surat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam tahun 2013, KSAP telah menetapkan 2 (dua) buah buletin teknis yaitu Buletin Teknis Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah dan Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2013, KSAP telah menerbitkan 14 (empat belas) buletin teknis yaitu:



Buletin Teknis
Standar Akuntansi Pemerintahan
Nomor 13

1. Buletin Teknis Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat;
2. Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;
3. Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi;
4. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja;
5. Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan;
6. Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang;
7. Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
8. Buletin Teknis Nomor 08 tentang Akuntansi Utang;
9. Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;
10. Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial;
11. Buletin Teknis Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud;
12. Buletin Teknis Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing;
13. Buletin Teknis Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah; dan
14. Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas.



Buletin Teknis
Standar Akuntansi Pemerintahan
Nomor 14

Disamping itu, terdapat beberapa buletin teknis yang dikembangkan, sampai akhir tahun 2013 sedang dalam proses pembahasan. Beberapa draf buletin teknis SAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buletin Teknis tentang Akuntansi Kerugian Negara;
2. Buletin Teknis tentang Akuntansi Piutang;
3. Buletin Teknis tentang Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
4. Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Pajak;

2. *Penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*

Dalam tahun 2013, KSAP telah menyelesaikan 2 (dua) draf Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sesuai dengan due process selanjutnya kedua draf tersebut akan dikirim ke BPK untuk mendapat pertimbangan dari BPK. Kedua draf PSAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. PSAP tentang Pendapatan - LO; dan
2. PSAP tentang Akuntansi dan Pelaporan BLU.

3. *Penyusunan Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*

Dalam tahun 2013, KSAP telah mengembangkan Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Investasi. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan PSAP tersebut dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum serta aturan dan mekanisme yang berlaku. Sampai dengan akhir Tahun 2013 draf tersebut dalam proses pembahasan final di dalam rapat pleno KSAP.

4. *Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan*

Kegiatan 1: Pelaksanaan Dengar Pendapat Terbatas

Tahun 2013, KSAP menyelenggarakan kegiatan dengar pendapat terbatas draf PSAP tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU pada tanggal 3 Oktober 2013 di Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok substansi draft PSAP tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU serta menggali masukan dari pihak-pihak yang kompeten secara terbatas yang terdiri dari BPKP, Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Akademisi dan beberapa Kepala BLU maupun BLUD.

Kegiatan 2: Pengembangan Kemampuan SDM KSAP

Di bidang pengembangan SDM, KSAP mengirim beberapa anggotanya mengikuti seminar, kongres, dan konferensi antara lain:

- *APEC Meeting* di Medan Sumatera Utara pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2013;
- Simposium Nasional Akuntansi Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Manado pada tanggal 25 s.d. 27 September 2013; dan
- *Regional Public Sector Conference* yang diselenggarakan oleh Ikatan akuntan Indonesia (IAI) di Surabaya pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2013

Kegiatan 3: Pemeliharaan Website KSAP



Dalam rangka memberikan informasi kepada publik mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah membangun *website* KSAP dengan alamat: <http://www.ksap.org> yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan *website* ditujukan untuk mengekspose seluruh produk yang dihasilkan KSAP, artikel-artikel, kegiatan KSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung *website*. Pada Tahun 2013 telah dilakukan perbaikan tampilan Website KSAP tersebut.

Kegiatan 5: Penyelenggaraan Help Desk

Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP telah membentuk tim *helpdesk* yang terdiri dari beberapa anggota Komite Kerja dan Kelompok Kerja yang bertugas menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP dan memberikan pemecahannya.

Kegiatan 6: Pelayanan Publik

Pada tahun 2013, KSAP telah memenuhi beberapa permintaan dari berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya untuk menjadi nara sumber tentang SAP. Selain itu, KSAP juga membantu memberikan konsultasi teknis atas

implementasi SAP kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu:

1. Pencatatan Penghapusan Piutang, Penyusutan Aset Tetap, dan BLUD dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Pencatatan Penempatan Akun sesuai SAP dalam Neraca dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Pencatatan Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar;
4. Kapitalisasi Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
5. Petunjuk Pengakuan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas;
6. Penjelasan Perlakuan Akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Pencatatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah dan Pencairan SP2D Lewat Tahun dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
8. Kapitalisasi Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
9. Pengakuan dalam Neraca Daerah atas Kewajiban Kepada Pihak Ketiga yang Belum Selesai Dilaksanakan dari Pemerintah Kota Bima;
10. Akuntansi BLM PNPM Mandiri Pedesaan dari Kementerian Dalam Negeri;
11. Perlakuan Akuntansi Kas di BUD dan Uang Muka yang Belum Jelas Pertanggungjawabannya dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
12. Akuntansi Belanja Modal dan Kapitalisasi Aset dari Pemerintah kabupaten tanah datar;
13. Kebijakan Akuntansi terhadap uang Pengganti dari Kejaksaan Agung;
14. Perlakuan Akuntansi atas Kerjasama dengan Pihak Ketiga dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Tulungagung;
15. Mekanisme Penambahan Pokok dana Khusus yang Berasal dari Saldo Kas BLU dari Ditjen Perbendaharaan;
16. Penjelasan Klasifikasi Belanja dan Nilai Perolehan dari Pemerintah Kota Bontang;
17. Pencatatan Ketekoran Kas Daerah dari Pemerintah Kabupaten Sragen;
18. Pendapatan tentang Tahun Perolehan dan Penilaian Tanah untuk jalan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;



C. Aspek Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2013, KSAP mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp 3.439.588.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSAP – Kementerian Keuangan Nomor DIPA-015.08.1.439165/2013 tanggal 5 Desember 2012. Dari anggaran tersebut, KSAP telah merealisasikan sebesar Rp3.388.474.600 atau 98,51% dari pagu anggaran.

Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi belanja KSAP Tahun Anggaran 2013:

Tabel II : Rencana dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2013

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	-	-	-
52	Belanja Barang	Rp 3.281.328.000	Rp 3.245.307.600	98,90%
53	Belanja Modal	Rp 158.260.000	Rp 143.167.000	90,46%
Jumlah		Rp 3.439.588.000	Rp 3.388.474.600	98,51%

D. Lain-lain

Lain-lain 1: Ruang Sekretariat KSAP

Dalam rangka tugas dan fungsi KSAP yang semakin luas, semakin banyaknya kunjungan dari para pemangku kepentingan, dan adanya rencana pembentukan Direktur Eksekutif SAP, ruangan yang representatif dibutuhkan oleh KSAP.

Tahun 2013 ini telah diproses permintaan dukungan fasilitasi ruang kesekretariatan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Lain-lain 2: Direktur Eksekutif

Pada tanggal 15 Agustus 2013 telah diselenggarakan rapat audiensi KSAP dengan Menteri Keuangan, salah satu kesimpulannya adalah diperlukannya pembentukan Direktur Eksekutif yang bekerja secara *full time* guna mendukung peran dan fungsi KSAP.

E. Kendala dan Strategi Pemecahannya

Pada tahun 2013, terdapat beberapa buletin teknis yang direncanakan dapat diselesaikan dan diterbitkan namun sampai dengan akhir tahun 2013 target tersebut tidak dapat dicapai. Hal ini disebabkan KSAP memerlukan kajian yang lebih mendalam terhadap substansi buletin teknis yang cukup kompleks. Selain itu, selama tahun 2013, KSAP juga banyak menerima pertanyaan/konsultasi terkait permasalahan implementasi SAP dari berbagai unit instansi baik tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan KSAP harus memahaminya secara hati-hati sehingga memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di tahun-tahun berikutnya, KSAP telah membentuk tim-tim kecil yang bertugas mengkaji dan menjawab atas pertanyaan/konsultasi dari berbagai instansi pemerintah tersebut.

BAB IV

RENCANA KERJA TAHUN 2014

Untuk mendukung implementasi SAP dan pengembangan SAP berbasis akrual, pada tahun 2014 KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Draf KSAP

Pada tahun 2014, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual, yaitu PSAP Akuntansi Investasi (KSO, BOT, BTO, KPS). Disamping itu ada wacana untuk menyusun Kebijakan Akuntansi terkait Pemerintah Desa.

2. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2014, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan/penerbitan buletin teknis SAP Berbasis Akrual. Tujuan dari penyusunan buletin teknis adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang SAP Berbasis Akrual dalam menyusun laporan keuangan, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

Buletin teknis SAP Berbasis Akrual yang akan diterbitkan adalah:

- 1) Buletin Teknis Akuntansi Piutang;
- 2) Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Non Pajak;
- 3) Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Pajak;
- 4) Buletin Teknis Akuntansi Kerugian Negara;

- 5) Buletin Teknis Akuntansi Utang;
- 6) Buletin Teknis Akuntansi Penyusutan;
- 7) Buletin Teknis Akuntansi Dana Bergulir;
- 8) Buletin Teknis Akuntansi Aset Tetap;
- 9) Buletin Teknis Akuntansi Bantuan Sosial;
- 10) Buletin Teknis Akuntansi ATB; dan
- 11) Buletin Teknis Akuntansi Neraca Awal Pemerintah.

Pada tahun 2014, tidak menutup kemungkinan KSAP menyusun buletin teknis baru, di luar daftar di atas, yang dibutuhkan dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.

3. Sosialisasi dan *Limited Hearing* SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Akrual

Pada tahun 2014, KSAP akan mengadakan sosialisasi mengenai SAP Berbasis Akrual dan buletin teknis baru SAP Berbasis Akrual. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pada tahun 2014, KSAP juga merencanakan mengadakan *Limited Hearing* mengenai Draf Bultek SAP Berbasis Akrual yang sedang dalam proses penyusunan.

4. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktek akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

5. Pemeliharaan Website KSAP

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya. Para pengunjung dapat mendownload dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs www.ksap.org.

6. Pemeliharaan Helpdesk

Tim *Helpdesk* yang telah dibentuk akan terus melakukan tugasnya pada tahun 2014. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently Asked Question* (FAQ) yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/ pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

7. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/ daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

8. Lain-lain

Ruangan Kesekretariatan dan Direktur Eksekutif harapannya di tahun 2014 sudah tersedia.



Suasana Rapat Tim Bultek Kas

BAB V

PENUTUP

Laporan Tahunan 2013 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lain dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerja dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan, serta memberi dukungan teknis implementasi SAP mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

